



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI;
Hari/Tanggal	: Selasa, 8 Maret 2016.
Pukul	: 14.00 WIB – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, SE, M.M /Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Penyelesaian Guru Honorar;2. Hasil UKG Tahun 2015 dan tindak lanjutnya;3. Masalah dan Solusi Tenaga Pendidik Non-Formal dan Guru Pendidikan Formal disetiap jenjang;4. Kualifikasi dan Sertifikasi;5. Kesiapan Guru terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013; dan6. Lain-lain.
Hadir	: 30 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Sumarna Surapranata, Ph.D/Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.19 WIB oleh Ferdiansyah, SE, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. ✓

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI. ✓

II. KESIMPULAN

A. Penyelesaian Guru Honorer.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI mengenai penyelesaian Guru dan Tenaga Honorer.
2. Ditjen Guru dan TK telah mengalokasikan anggaran serta memprioritas bagi Guru Honorer sebagai berikut:
 - a. Pemberian insentif guru bukan PNS (honorar) pada APBN 2015 sebesar Rp.155M untuk 43.192 orang, dan pada APBN 2016 sebesar Rp.389M untuk 108.311 orang.
 - b. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi guru bukan PNS atau Guru Pembelajar pada APBN 2015 sebesar Rp.262M untuk 131.009 orang dan pada APBN 2016 sebesar Rp.865M untuk 451.620 orang.
 - c. Menyediakan 3000 orang Guru Garis Depan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.107M pada APBN 2016.
3. Komisi X DPR RI meminta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI untuk menyampaikan data lengkap mengenai Guru Honorer K-1 dan K-2 secara tertulis paling lambat tanggal 11 Maret 2016.
4. Komisi X DPR RI meminta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Guru Honorer yang tidak dapat diangkat sebagai PNS.
5. Komisi X DPR RI meminta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI untuk segera membuat regulasi tentang pengangkatan guru honor yang mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
6. Komisi X DPR RI meminta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI untuk menyampaikan data lengkap mengenai Tenaga Kependidikan secara tertulis paling lambat tanggal 18 Maret 2016

B. Hasil Uji Kompetensi Guru 2015 dan tindak lanjutnya

1. Pelaksanaan UKG pada 2015 telah mencapai 91.51% yaitu dari jumlah guru yang mendaftar sebanyak 2.950.099 orang dan yang menyelesaikan ujian kompetensi sebanyak 2.699.516 orang. Dari sisi kualitas hasil UKG pada tahun 2015 berdasarkan rerata Nilai Pedagogik dan Profesional sebesar 56.69 meningkat dibandingkan hasil UKG Tahun 2012-2013 mencapai 47.
2. Komisi X DPR RI meminta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk segera merealisasikan penghargaan bagi 118.444 orang Guru yang nilai UKG diatas 81.

C. Kualifikasi dan Sertifikasi Guru

Komisi X DPR RI mendorong Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI untuk segera membuat rancangan tahapan proses sertifikasi bagi guru yang belum memiliki sertifikat.

D. Kesiapan Guru terhadap Pelaksanaan Kurikulum 2013

Komisi X DPR RI akan mengadakan pembahasan tersendiri terkait agenda kesiapan pelaksanaan K-13 dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI dalam rapat tersendiri. ✓

E. Lain-lain.

1. Komisi X DPR RI meminta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI untuk melakukan kajian yang komprehensif terkait pengaturan guru dan tenaga pendidikan untuk menjadi urusan Pemerintah. ✓
2. Terhadap kekurangan pembayaran tunjangan guru sebesar Rp.1,88T pada tahun 2016, Komisi X DPR RI meminta Pemerintah untuk segera mengajukan kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓
3. Komisi X DPR RI meminta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI untuk menyampaikan data dan aplikasi guru paling lambat tanggal 11 Maret 2016. ✓
4. Komisi X DPR RI dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI sepakat untuk melakukan pembahasan dan pendalaman terkait permasalahan guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan dan rutin untuk mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan GTK. ✓

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.40 WIB

KETUA RAPAT,


FERDIANSYAH, SE, M.M. ✓